

Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo: Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Disabilitas

Aura Juliza Putri^{1*}, M. Agus Muljanto²

¹²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Studi ini menilai partisipasi pemilih disabilitas dalam sosialisasi dan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan hanya 100 dari 5.855 penyandang disabilitas yang menghadiri sosialisasi, sementara 1.075 orang (18,36%) menggunakan hak pilihnya. Hambatan utama meliputi keterbatasan aksesibilitas, lokasi yang kurang strategis, dan minimnya pemahaman tentang pentingnya pemilu. Upaya peningkatan partisipasi dilakukan melalui penyediaan alat bantu (Braille), pendampingan KPPS, dan pengantaran surat suara. Meski ada adaptasi, kendala akses fisik dan distribusi informasi masih menjadi tantangan. Menggunakan indikator efektivitas Richard M. Steers (pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi), studi ini menyoroti perlunya strategi pemilu yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Pemilu, Pemilihan Umum, Penyandang disabilitas, Partisipasi pemilih, Sosialisasi, Inklusivitas, Aksesibilitas

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2182>

*Correspondence: Aura Juliza Putri
Email: auraajlz30@gmail.com

Received: 14-04-2025

Accepted: 18-05-2025

Published: 22-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research examines the involvement of voters with disabilities in the socialization and execution of the 2024 elections in Sidoarjo Regency through a descriptive qualitative approach. The findings reveal that only 100 out of 5,855 individuals with disabilities participated in the socialization, while 1,075 (18.36%) exercised their voting rights. Major obstacles include accessibility limitations, less strategic locations, and a lack of awareness regarding the significance of elections. Efforts to enhance participation include the provision of assistive tools (Braille), support from KPPS, and home ballot delivery. Despite these measures, challenges persist in physical accessibility and information dissemination. Applying Richard M. Steers' effectiveness indicators (goal achievement, integration, and adaptation), this study underscores the necessity for more inclusive electoral strategies.

Keywords: Election, General election, Persons with disabilities, Voter participation, Election socialization, Inclusiveness, Accessibility

Pendahuluan

Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk menjadi bagian dari suara yang membentuk arah sebuah bangsa. Terlepas dari perbedaan latar belakang, kondisi fisik, atau status sosial, partisipasi politik adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia dan esensi keadilan demokrasi. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih, mencalonkan diri, dan menyuarakan gagasan dalam upaya memengaruhi kebijakan publik. Pada tulisan yang dibahas oleh (Bawamenewi, 2019) hak politik didefinisikan sebagai hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang untuk memperoleh kekuasaan, jabatan dan sumber daya yang menguntungkan bagi dirinya.

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih menghadapi berbagai kendala. Terbatasnya akses fisik ke TPS, minimnya fasilitas pendukung seperti alat bantu atau petunjuk khusus, serta minimnya informasi dalam format yang mudah diakses seringkali menjadi tantangan. Sosialisasi pemilihan umum yang dirancang untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada para pemilih penyandang disabilitas terkadang tidak sepenuhnya efektif. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap proses pemilu dan hak-hak politik mereka menjadi kurang baik dan dapat mengurangi partisipasi mereka dalam pesta demokrasi.

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap pembangunan serta sumber daya di keluarga maupun di masyarakat. Hambatan ini dapat berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan negara, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan akibat diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang dialami pun bervariasi, tergantung pada tempat dan waktunya. Penyebab diskriminasi ini dapat berasal dari kebijakan pemerintah, pemahaman agama atau kepercayaan tertentu, tradisi, hingga asumsi sosial yang berkembang di masyarakat. (Desti, 2018)

Salah satu landasan penting dalam hukum internasional saat ini adalah Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. Ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara global. CRPD bertujuan untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi. Konvensi ini juga mengubah paradigma dengan melihat penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak yang sama dan tidak hanya sebagai objek bantuan sosial. (Kordi, 2022)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemilihan umum yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan program sosialisasi yang menasar para pemilih penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses pemilu, penggunaan hak pilih, dan fasilitas yang tersedia. Akan tetapi, efektivitas program sosialisasi ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar memenuhi kebutuhan khusus pemilih dengan disabilitas. Kajian ini menyoroti persoalan utama, bagaimana program sosialisasi pemilu dapat memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas. Sebagaimana kelompok yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, pemilih penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses dan kurangnya informasi yang memadai.

Pada studi yang dibahas oleh (Julianto et al., 2021) efektivitas diartikan sebagai sejauh mana organisasi berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut (Amitai, 1982) efektivitas menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan yang diupayakan. (Komaruddin, 1994) juga menjelaskan bahwa efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan manajemen dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, efektivitas organisasi dalam (In'am et al., 2023) diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau ketepatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh

pimpinan dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pemahaman ini mencakup pencapaian sasaran tepat waktu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta peran tujuan organisasi dalam memberikan arahan, mengurangi ketidakpastian, dan menjadi standar penilaian kinerja.

Sosialisasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok sasaran atau pemangku kepentingan lainnya. Melalui proses ini diharapkan mereka tidak hanya mengetahui bahwa kebijakan tersebut ada, tetapi juga memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik akan membantu mereka untuk mengetahui relevansi kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan kondisi mereka (Herdiana, 2018). Sosialisasi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mempelajari dan menginternalisasi berbagai norma, nilai, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Pada bidang politik, sosialisasi politik mengacu pada upaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak politik mereka sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan politik. (Kelibay et al., 2023)

Sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo hanya dilakukan satu kali, yaitu pada 8 November 2024 di Loka Bina Karya, Jl. Raya Lebo, Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Karena kegiatan ini hanya diselenggarakan di satu lokasi, aksesibilitas menjadi tantangan besar bagi peserta dari berbagai kecamatan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memastikan pemilu yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. Hak politik tidak hanya sebatas ketentuan formal dalam peraturan, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik nyata. Dengan mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang relevan bagi KPU dan pihak terkait untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi optimal penyandang disabilitas tidak hanya mencerminkan demokrasi yang sehat, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama negara yang inklusif dan berkeadilan.

Richard M. Steers memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya (Steers, 1980). Efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil yang diharapkan dari sebuah program atau proyek dapat tercapai, yang dapat diukur dengan berbagai indikator seperti produktivitas, kualitas, dan kepuasan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana tujuan organisasi atau program dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers dan pemenuhan indikator-indikator efektivitas seperti (1) Efektivitas pencapaian tujuan, (2) Efektivitas integrasi, dan (3) Efektivitas adaptasi, studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program sosialisasi yang telah dilaksanakan dirancang secara inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan khusus pemilih dengan disabilitas. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti aksesibilitas, keterjangkauan lokasi sosialisasi, serta kualitas informasi yang diberikan, yang kesemuanya penting untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses demokrasi.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh (Moleong, 2010), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penggunaan metode ini didasarkan pada kelebihanannya yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data yang bernilai tinggi, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang detail dan akurat mengenai situasi di lapangan. Secara umum, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mempelajari tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Hasbullah et al., 2022)

Menurut (Wirartha, 2006) metode analisa juga dapat dipahami sebagai metode untuk mengkaji atau mendeskripsikan berbagai macam kasus dari berbagai macam informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur.. Dalam sttudi ini, observasi dilakukan dengan mengamati proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan mencakup berbagai informasi berupa perkataan, aksi, dokumentasi, kondisi dan berbagai peristiwa yang dapat diamati. Sumber data diperoleh baik secara langsung melalui observasi dan wawancara maupun secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan kegiatan yang terdokumentasi.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, digunakan tiga metode pengumpulan data. Pertama yaitu dengan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang terlibat. Selanjutnya observasi lapangan yang digunakan untuk mencatat detail proses yang terjadi secara langsung. Tidak hanya itu, dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan bukti-bukti tertulis dan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan interaktif menurut Miles dan Huberman (2014). Analisis ini terdiri dari empat tahap utama. Pertama, data akan dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu, data yang tidak relevan disaring dan dirangkum dalam fase reduksi data. Kemudian, dilakukan penyajian data yang telah dipilih dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, seperti dalam bentuk narasi atau tabel. Terakhir, proses analisis diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan.

Studi ini berfokus pada upaya untuk memberikan deskripsi yang mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, mencakup strategi yang diterapkan, metode yang digunakan, serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di wilayah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kehadiran Pemilih Disabilitas dalam Sosialisasi Pemilu

Peran serta dalam kegiatan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, tentang hak-hak politik dan prosedur pemilu. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan dapat menjangkau target sasaran dengan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Akan tetapi, rendahnya kehadiran di acara sosialisasi tidak selalu menjadi satu-satunya alasan rendahnya partisipasi dalam pemilu. Beberapa faktor lain, seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara, ketersediaan fasilitas khusus, dan batasan mobilitas, juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih.

Berkaitan dengan Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo, data menunjukkan bahwa hanya 100 peserta penyandang disabilitas yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dari total 5.855 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah ini menunjukkan adanya tantangan untuk menjangkau dan melibatkan penyandang disabilitas secara optimal. (KPU Sidoarjo, 2024a)

Kehadiran yang rendah pada sosialisasi selama pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah aksesibilitas yang terbatas sehingga sosialisasi tidak dapat menjangkau semua wilayah atau kelompok penyandang disabilitas. Disamping itu, waktu dan lokasi yang kurang sesuai juga dapat menjadi penghalang, banyaknya calon peserta yang sulit hadir karena jarak yang jauh atau waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 8 November 2024. Kegiatan ini dilakukan di satu tempat saja, sehingga aksesibilitas menjadi tantangan besar bagi peserta dari berbagai kecamatan. Tidak ditemukan alasan spesifik mengapa sosialisasi hanya dilakukan satu kali. Namun, keterbatasan anggaran, waktu, atau sumber daya dapat menjadi faktor penyebab. Hal ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan di masa mendatang.

Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pemilu dapat berdampak signifikan, di mana beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak merasa termotivasi untuk mengikuti sosialisasi. Bahkan, meskipun mereka telah mengikuti sosialisasi, hambatan lain seperti kesulitan fisik untuk menjangkau tempat pemungutan suara, kurangnya pendampingan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik masih dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu.

Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Hari Pemilihan

Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo cukup signifikan, tercatat sebanyak 1.075 penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Jumlah kertas suara yang digunakan dalam Pilkada 2024 mencapai 1.075 suara dari total 5.855 pemilih disabilitas. Dari jumlah tersebut, 518 orang adalah laki-laki dan 494 orang adalah perempuan, memberikan kontribusi yang relatif seimbang dari kedua jenis kelamin. Akan tetapi, angka partisipasi ini hanya mencapai 18,36% dari 5.855 penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang mengindikasikan bahwa masih banyak

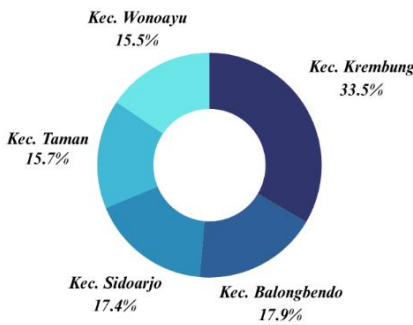
penyandang disabilitas yang belum menggunakan hak pilihnya. (KPU Sidoarjo, 2024b). Penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT terbagi dalam beberapa kategori disabilitas. Berikut data yang sudah ada.

Tabel 1. Distribusi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori di Kabupaten Sidoarjo

No.	Keterangan Disabilitas	Jumlah Penyandang
1	Disabilitas fisik	2.023
2	Tunawicara	1.495
3	Disabilitas mental	1.091
4	Disabilitas intelektual	444
5	Tunarungu	401
6	Tunanetra	401

Sebagai upaya mendukung partisipasi aktif para pemilih tunanetra, seluruh KPU, termasuk KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan alat bantu berupa template *Braille* untuk mempermudah mereka dalam memberikan suara. Tidak hanya itu, untuk memastikan partisipasi penuh, para penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau keluarga mereka untuk mendampingi mereka dalam memberikan suara. Bahkan, jika mereka mengalami kesulitan untuk pergi ke TPS, surat suara dan perlengkapan pemilu dapat diantarkan langsung ke rumah mereka, yang bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi para pemilih penyandang disabilitas fisik.

Adapun sebaran 5 kecamatan terbanyak pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut



Gambar 1. Presentase Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori di Kabupaten Sidoarjo

Jumlah pemilih penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Krembung dengan jumlah 181 pemilih. Selanjutnya, kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas yang cukup banyak adalah Kecamatan Waru dengan 102 pemilih, disusul Kecamatan Balongbendo dengan 97 pemilih, Kecamatan Sidoarjo dengan 94 pemilih, Kecamatan Taman dengan 85 pemilih, dan yang terakhir adalah Kecamatan Wonoayu dengan 84 pemilih. Dari sebaran ini terlihat bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas tersebar

di berbagai kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, terlepas dari masih adanya perbedaan jumlah partisipasi antar kecamatan.

Terlepas dari angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo yang masih tergolong rendah, namun upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi semakin terlihat dengan adanya berbagai fasilitas dan dukungan yang diberikan. Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga, KPPS, maupun lembaga penyelenggara pemilu, menjadi kunci untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan lebih baik di masa mendatang.

Pembahasan

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, efektivitas organisasi diukur berdasarkan sejauh mana tujuan tercapai, yang dapat dianalisis melalui indikator seperti pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi pemilu bagi pemilih disabilitas di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi beberapa kendala dalam mencapai ketiga dimensi efektivitas tersebut.

1. Efektivitas Pencapaian Tujuan

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi sangat rendah, hanya 100 orang dari total 5.855 penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya berhasil menjangkau kelompok sasaran. Meskipun lebih banyak penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan (1.075 orang atau 18,36%), ini masih menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi yang diharapkan.

2. Efektivitas Integrasi

Sosialisasi hanya dilakukan sekali di satu lokasi pada 8 November 2024, yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan. Kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi penyebab utama terbatasnya kesempatan integrasi dalam program ini, sehingga kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah yang membutuhkan.

3. Efektivitas Adaptasi

Berbagai upaya adaptasi seperti penyediaan template Braille untuk pemilih tunanetra dan dukungan pendampingan dari KPPS atau keluarga menunjukkan bahwa ada usaha untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Namun, masalah aksesibilitas fisik ke tempat sosialisasi dan TPS, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemilu, tetap menjadi penghalang yang signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun ada langkah-langkah untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas, pelaksanaan sosialisasi pemilu di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya efektif menurut kriteria Steers. Diperlukan perbaikan dalam perencanaan yang lebih inklusif, pelaksanaan yang lebih mudah diakses, dan penyampaian informasi yang lebih jelas untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan teori efektivitas Richard M. Steers, yang mengukur efektivitas organisasi berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya efektif, dengan analisis berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Program sosialisasi pemilu belum mencapai tujuannya secara optimal, terlihat dari jumlah peserta yang rendah, hanya 100 orang dari 5.855 penyandang disabilitas yang terdaftar. Meskipun lebih banyak penyandang disabilitas menggunakan hak pilih (18,36%), partisipasi ini masih jauh dari yang diharapkan.

2. Integrasi

Efektivitas integrasi juga terganggu oleh keterbatasan dalam penyelenggaraan sosialisasi yang hanya dilakukan sekali di satu tempat. Hal ini menghambat partisipasi penyandang disabilitas dari wilayah lain. Terbatasnya anggaran dan sumber daya menjadi faktor utama yang membatasi cakupan sosialisasi secara merata.

3. Adaptasi

Beberapa upaya adaptasi seperti penyediaan alat bantu Braille dan pendampingan dari keluarga atau KPPS menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Namun, masalah aksesibilitas fisik dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pemilu masih menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi mereka.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya positif untuk mendukung penyandang disabilitas, program sosialisasi pemilu di Kabupaten Sidoarjo belum berhasil secara maksimal berdasarkan ketiga indikator efektivitas tersebut. Perlu adanya perbaikan dalam aksesibilitas, penyampaian informasi, dan perencanaan yang lebih inklusif untuk meningkatkan efektivitasnya.

Daftar Pustaka

- Amitai, E. (1982). *Organisasi-Organisasi Modern*. : Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
- Bawamenewi, A. (2019). *IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA*.
- Desti, T. (2018). *HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*. <http://ppkn.org>
- Hasbullah, Aristin RIni, Syaiful, Anam, S., & Kasanova, R. (2022). *EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PERSPEKTIF MODEL RICHARD M STEERS DI DESA GUNUNG MADDAH KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG*. 7. <http://lib.unnes.ac.id/38248/1/8111413188.pdf>.
- Herdiana. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*.
- In'am, A., Rudian, M. I. A., & Apriyadi, B. (2023). *MODEL DAN PENDEKATAN KEEFEKTIFAN ORGANISASI*. *Cermin Jurnal*.

- Julianto, B., Yunara, T., & Carnarez, A. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PROFESSIONAL: KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI EFEKTIF, KINERJA, DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI (SUATU KAJIAN STUDI LITERATURE REVIEW ILMU MANAJEMEN TERAPAN)*. 2(5). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>
- Kelibay, I., Nurjannah, S., Arifin Abdul Kadir, M., Saleh Refra, M., Diana Kalagison, M., Qadriyani Malikin Rumakat, L., Boinauw, I., & Politik, S. (2023). Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 442–449. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.115>
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen* (Ke 2). Bina Aksara.
- Kordi, K. (2022, December). *Hak-Hak Disabilitas*. BaKTINews.
- KPU Sidoarjo. (2024a, November 2). *KPU Sidoarjo Siapkan Piranti dan Kebijakan Khusus Bagi Disabilitas dan Manula di Pilkada 2024*. Kab-Sidoarjo.Kpu.Go.Id.
- KPU Sidoarjo. (2024b, December 6). *LUAR BIASA: Seribu Penyandang Disabilitas Sidoarjo Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024*. Kab-Sidoarjo.Kpu.Go.Id.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Steers, R. M. (1980). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku)* (M. Jamin, Ed.). Erlangga.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Sosial Ekonomi*. CV, Andi Offset.